

# APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA

---



APBNP 2017:  
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Hingga Ujung Negeri

---



“ Tahun 2017 menunjukkan suatu kinerja dan realisasi yang sangat positif atau menggembirakan. APBN masih memiliki daya dorong, namun kesehatan dan kesinambungannya tetap terjaga baik”

---

**Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,**  
Disampaikan pada saat Konferensi Pers  
Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi  
APBN-P 2017, 2 Januari 2018

# 15,5%

Pertumbuhan Penerimaan Pajak (tanpa *Tax Amnesty* dan Revaluasi Aset) dibandingkan tahun 2016. Total Penerimaan Pajak Mencapai Rp1.147,5 triliun\*, atau 89,4 persen dari target APBNP 2017.

# 101,7%

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp192,3 triliun dibandingkan target APBNP 2017 sebesar Rp189,1 triliun, atau tumbuh 7,4 persen dibandingkan tahun 2016.

# 118,5%

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) mampu melebihi target APBNP 2017 yang mencapai Rp308,4 triliun, atau tumbuh 17,7 persen dibandingkan tahun 2016.

# 7,4%

Pertumbuhan Realisasi Belanja Negara dibandingkan tahun 2016. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.001,6 triliun, atau 93,8 persen dari pagu APBNP 2017.

# 4,5%

Pertumbuhan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). TKDD mencapai Rp742 triliun, atau 96,8 persen dari pagu APBNP 2017.

# 2,57%

Defisit APBN dapat dijaga dalam batas yang aman (2,57 persen PDB), jauh lebih rendah dari yang ditetapkan APBNP 2017 yang sebesar 2,92 persen meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar 2,49%.

## OUTPUT BELANJA PEMERINTAH PUSAT RP1.259,6 TRILIUN



### Bidang Infrastruktur

794 km pembangunan jalan, 9.072 m pembangunan jembatan, penyelesaian pembangunan tiga bandara, dan pembangunan 618,3 km rel kereta api;



### Bidang Pendidikan

penyaluran Kartu Indonesia Pintar kepada 19,8 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah bagi 8,0 juta siswa, dan beasiswa Bidik Misi untuk 364,4 ribu mahasiswa;



### Bidang Kesehatan dan Perlindungan Sosial

penyaluran Kartu Indonesia Sehat kepada 92,1 juta jiwa penerima bantuan iuran serta Program Keluarga Harapan bagi 6 juta keluarga penerima manfaat.

Peningkatan realisasi belanja turut mendorong tercapainya berbagai sasaran strategis yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat, realisasi TKDD tahun 2017 mencapai 96,8 persen dari pagu APBNP yang disalurkan dalam rangka mendukung implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal

## CAPAIAN OUTPUT YANG TELAH BERHASIL DIDORONG DARI PENDANAAN TKDD



Pembangunan jalan baru sepanjang 1.033 km, pemeliharaan jalan sepanjang 1.503 km, dan peningkatan kualitas jalan sepanjang 9.789 km



Meringankan biaya pendidikan bagi 46,6 juta siswa (SD/SMP/SMA/SMK) dan 5,6 juta peserta pendidikan anak usia dini (PAUD)



Pembangunan jembatan sepanjang 3.749 m, pemeliharaan jembatan sepanjang 291 m, dan peningkatan kualitas jembatan sepanjang 2.916 m



Meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja 1,7 juta guru PNS Daerah serta memberikan kompensasi atas kesulitan hidup 41 ribu guru di daerah khusus



Pembangunan 1.351 ruang kelas baru, rehabilitasi 11.006 ruang kelas, dan penambahan koleksi perpustakaan daerah sebanyak 11.758 paket pekerjaan



Meringankan beban biaya pelayanan kesehatan di 9,7 ribu Puskesmas dan 4,8 ribu Balai Penyuluhan KB



Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana kesehatan pada 347 rumah sakit dan 3.873 Puskesmas, baik berupa gedung bangunan, instalasi farmasi maupun alat kesehatan



Pembangunan 107,9 ribu km jalan desa, 89,2 ribu unit pos pelayanan kesehatan pedesaan, 178,8 ribu unit MCK di pedesaan, 107,7 ribu unit sambungan air bersih dan 25.903 hektar lahan terairi irigasi di pedesaan

\*Sampai dengan publikasi ini dirilis, angka realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 mengalami update dengan tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp4 triliun."

# APBNP 2017: MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI, HINGGA UJUNG NEGERI

**S**ecara umum, kinerja perekonomian nasional sepanjang tahun 2017 mengalami perbaikan dan pertumbuhan dengan didukung terjaganya stabilitas makroekonomi, di tengah berbagai tantangan dan potensi risiko yang bersumber dari perekonomian global. Laju inflasi nasional yang stabil pada tingkat yang rendah serta relatif terjaganya pergerakan nilai tukar rupiah telah memberikan dampak pada terjaganya daya beli masyarakat dan meningkatnya aktivitas ekonomi dalam negeri, termasuk di sektor industri pengolahan dan perdagangan. Kinerja positif perekonomian nasional tersebut juga terlihat dari penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan Rasio Gini, yang masing-masing menurun menjadi 5,5 persen, 10,1 persen dan 0,39.

Capaian positif perekonomian Indonesia tersebut menunjukkan peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dapat berjalan

secara kredibel, efektif, efisien, serta berkelanjutan (sustainable). Pertumbuhan ekonomi sampai dengan kuartal III tahun 2017 sebesar 5,03 persen yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,05 persen sampai dengan akhir tahun. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan realisasi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan dan PNBPN yang sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai Rp1.655,8 triliun (95,4 persen dari target APBNP 2017), tumbuh 6,4 persen dari tahun 2016

**Realisasi penerimaan perpajakan dalam APBNP 2017 menunjukkan hasil yang mengembirakan. Hal ini tercermin dari Penerimaan Pajak tumbuh 15,5 persen (tanpa Tax Amnesty dan Revaluasi Aset), didukung oleh pertumbuhan yang positif pada seluruh sektor utama, khususnya industri pengolahan dan perdagangan.** Penerimaan pajak mencapai Rp1.147,5 triliun<sup>9)</sup> atau 89,4 persen dari target APBNP 2017. Jika dengan menghitung penerimaan Tax Amnesty pun masih mengalami

pertumbuhan sebesar 3,8 persen. Angka pertumbuhan ini merupakan kombinasi pertumbuhan positif di hampir semua jenis pajak, yaitu: PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN Dalam Negeri, dan PPh Final 1 persen (PP 46). Pertumbuhan yang sangat pesat terjadi di segmen PPh Orang Pribadi, terutama terjadi pada segmen pembayar pajak orang pribadi peserta Amnesti Pajak. Pertumbuhan yang tinggi juga terjadi di segmen PPh Final bagi Wajib Pajak dengan Penghasilan Bruto Tertentu (PPh Final 1 persen). Kondisi ini mengindikasikan semakin meningkatnya kontribusi sektor UMKM.

Lima sektor terbesar penerimaan pajak bersumber dari sektor Industri Pengolahan (Manufaktur), Perdagangan (Besar dan Eceran), Jasa Keuangan, Konstruksi, dan Pertambangan yang berkontribusi sekitar 76,0 persen dari total penerimaan. Dua sektor utama, yakni sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan secara umum merupakan kontributor utama perekonomian nasional (mencakup sekitar 33 persen PDB nasional). Peningkatan penerimaan pajak pada sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan menunjukkan sinyal positif aktivitas perekonomian baik dari sisi produksi (Sektor Industri Pengolahan) maupun dari sisi distribusi (Sektor Perdagangan).

**Sebagai bagian dari penerimaan perpajakan, kinerja yang positif**

**juga terjadi pada penerimaan Kepabeanaan dan Cukai.** Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai mencapai Rp192,3 triliun atau 101,7 persen dari target APBNP Rp189,1 triliun. Dalam tiga tahun terakhir, baru kali ini pencapaian melebihi target APBNP. Realisasi tahun 2015 hanya sebesar 92,1 persen dan tahun 2016 sebesar 97,3 persen. Capaian tersebut dipengaruhi antara lain oleh peningkatan kinerja konsumsi domestik yang menunjukkan masih cukup tingginya daya beli masyarakat, menguatnya kinerja ekspor-impor, meningkatnya harga komoditas internasional, dan penertiban importir berisiko tinggi (PIBT), serta penertiban cukai berisiko tinggi (PCBT). Pertumbuhan ekspor dan impor di tahun 2017 mencatat pertumbuhan positif, setelah pada tahun-tahun sebelumnya mencatat kontraksi pertumbuhan. Kinerja ekspor nasional mampu tumbuh tinggi didorong oleh peningkatan permintaan negara-negara mitra dagang utama dan harga komoditas global. Dari sisi impor, peningkatan pertumbuhan didorong oleh permintaan domestik yang masih cukup tinggi baik barang modal dan bahan baku maupun barang konsumsi. Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai terus didorong untuk mendukung daya saing industri nasional. Di sektor perdagangan, Kemenkeu ikut berkontribusi menciptakan kemudahan berbisnis di Indonesia melalui sistem *single billing/ single payment* dalam pembayaran bea masuk dan Pajak

Dalam Rangka Impor (PDRI), yang dianggap meningkatkan peringkat kemudahan melakukan usaha di Indonesia (*Ease of Doing Business/ EoDB*) dari tahun ke tahun. Di sektor industri, guna mendukung pembangunan industri nasional yang memiliki daya saing, diberikan melalui insentif fiskal antara lain berupa Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Kawasan Berikat (KB), Gudang Berikat (GB), Pusat Logistik Berikat (PLB), dan lain sebagainya.

**Disisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mampu melebihi target APBNP 2017 yang mencapai Rp308,4 triliun atau 118,5 persen dari target dan tumbuh sebesar 17,7 persen dibandingkan tahun 2016.** Pencapaian tersebut didorong oleh semua sumber/ komponen PNBP. Penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam (SDA) mencapai Rp111,0 triliun atau 116,1 persen dari target. Pencapaian penerimaan dari SDA dipengaruhi oleh adanya peningkatan harga komoditas pertambangan (minyak mentah dan batu bara). Sampai dengan Desember 2017, rata-rata harga minyak mentah Indonesia dan harga batu bara acuan (HBA) masing-masing mencapai US\$51,2 per barel dan US\$85,9 per ton. Sementara itu, Pendapatan dari Bagian Laba BUMN mencapai Rp43,9 triliun atau 107,1 persen dari target dan PNBP Lainnya mencapai Rp108,8 triliun atau 127,9 persen dari target. Penerimaan dari Bagian Laba

BUMN tersebut terdiri dari BUMN Perbankan sebesar Rp12,5 triliun dan BUMN Non Perbankan sebesar Rp31,4 triliun. Untuk PNBP Lainnya penerimaan didominasi dari sumber pendapatan jasa yang dikelola oleh beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp50,9 triliun. Disamping itu, Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) juga mampu melebihi target, mencapai Rp44,7 triliun atau 116,0 persen dari target.

**Pada saat yang sama, realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Desember 2017 mencapai sebesar Rp2.001,6 triliun atau 93,8 persen dari pagu APBNP.**

Belanja tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.259,6 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp742,0 triliun atau masing-masing tumbuh 9,1 persen dan 4,5 persen dari realisasi tahun 2016. Relatif tingginya realisasi Belanja Modal dan Bantuan Sosial tahun 2017 menunjukkan kontribusi Belanja Pemerintah Pusat terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Realisasi Belanja Modal pada APBNP 2017 mencapai 92,8 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang hanya 82,0 persen. Sedangkan realisasi Bantuan Sosial mencapai 100 persen. Peningkatan realisasi belanja tersebut turut mendorong tercapainya berbagai sasaran strategis yang secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat, diantaranya: (1) **bidang infrastruktur** berupa 794 km pembangunan jalan, 9.072 m



pembangunan jembatan, penyelesaian pembangunan tiga bandara dan, dan pembangunan 618,3 km rel kereta api; (2) **bidang pendidikan** diwujudkan dengan penyaluran Kartu Indonesia Pintar kepada 19,8 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah bagi 8,0 juta siswa, dan beasiswa Bidik Misi untuk 364,4 ribu mahasiswa; serta (3) **bidang kesehatan dan perlindungan sosial** melalui penyaluran Kartu Indonesia Sehat kepada 92,1 juta jiwa penerima bantuan iuran serta Program Keluarga Harapan bagi 6 juta keluarga penerima manfaat. Di sisi lain, realisasi anggaran subsidi tahun 2017 mencapai Rp166,3 triliun (98,5 persen terhadap APBNP) atau lebih rendah 4,6 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini lebih disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan subsidi listrik lebih tepat sasaran untuk rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 900 VA. Selain itu, lebih rendahnya realisasi subsidi tahun 2017 juga disebabkan oleh adanya pengalihan sebagian belanja subsidi ke program bantuan sosial.

**Pengelolaan TKDD tahun 2017 menunjukkan efektifitas APBN dalam mendorong pelayanan dasar publik dan aktivitas perekonomian di daerah.** Dalam rangka mendukung implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, realisasi TKDD tahun 2017 mencapai 96,8 persen dari pagu APBNP. Capaian output yang telah berhasil didorong dari pendanaan tersebut diantaranya adalah: (i) pembangunan jalan baru sepanjang 1.033 km, pemeliharaan jalan sepanjang 1.503 km, dan peningkatan kualitas jalan

sepanjang 9.789 km, (ii) pembangunan jembatan sepanjang 3.749 m, pemeliharaan jembatan sepanjang 291 m, dan peningkatan kualitas jembatan sepanjang 2.916 m, (iii) pembangunan 1.351 ruang kelas baru, rehabilitasi 11.006 ruang kelas, dan penambahan koleksi perpustakaan daerah sebanyak 11.758 paket pekerjaan, (iv) peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana kesehatan pada 347 rumah sakit dan 3.873 Puskesmas, baik berupa gedung bangunan, instalasi farmasi maupun alat kesehatan, (v) meringankan biaya pendidikan bagi 46,6 juta siswa (SD/SMP/SMA/SMK) dan 5,6 juta peserta pendidikan anak usia dini (PAUD), (vi) meningkatkan kesejahteraan dan etos kerja 1,7 juta guru PNS Daerah serta memberikan kompensasi atas kesulitan hidup 41 ribu guru di daerah khusus, (vii) meringankan beban biaya pelayanan kesehatan di 9,7 ribu Puskesmas dan 4,8 ribu Balai Penyuluhan KB, serta (viii) pembangunan 107,9 ribu km jalan desa, 89,2 ribu unit pos pelayanan kesehatan pedesaan, 178,8 ribu unit MCK di pedesaan, 107,7 ribu unit sambungan air bersih dan 25.903 hektar lahan terairi irigasi di pedesaan.

**Kinerja yang positif pada Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut mendorong terjaganya keberlanjutan fiskal. Defisit APBN dapat dijaga dalam batas yang aman (2,57 persen PDB), jauh lebih rendah dari yang ditetapkan APBNP 2017 yang sebesar 2,92 persen.** Adanya penyesuaian defisit APBNP berpengaruh terhadap pengelolaan pembiayaan melalui penyesuaian penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Dengan pengelolaan pembiayaan



yang hati-hati (*prudent*), SBN berhasil menutup defisit APBNP 2017 sebesar Rp441,8 triliun dengan biaya yang relatif rendah. Stabilitas nilai tukar dan penurunan suku bunga SPN telah memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan keseimbangan primer sebagai salah satu indikator sustainabilitas fiskal. Keseimbangan primer sampai dengan akhir tahun 2017 membaik, hanya sebesar negatif Rp129,3 triliun, jauh lebih rendah dari yang ditetapkan dalam APBNP sebesar negatif Rp178,0 triliun.

Pemerintah secara konsisten menjaga defisit dibawah 3 persen dan rasio utang di bawah 30 persen dari PDB. Bauran kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial, serta koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Bank Indonesia juga berperan sangat besar dalam menjaga stabilitas Rupiah dan penurunan tingkat suku bunga SPN 3 bulan. Disamping itu, peningkatan rating utang Indonesia oleh S&P dan Fitch di tahun 2017 juga menjadi salah satu indikator terjaganya kepercayaan pemodal asing terhadap perekonomian nasional dan mendorong penurunan imbal hasil (*yield*) SBN. Pencapaian ini secara keseluruhan menunjukkan kembalinya kredibilitas fiskal sebagai instrumen kebijakan dalam mengakselerasi pembangunan nasional yang berkeadilan.

**Selain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit, sisi pembiayaan tetap berperan untuk mengalokasikan investasi pemerintah.** Pemerintah mengalokasikan sebesar total Rp60,7

triliun pada APBNP Tahun 2017 untuk pembiayaan investasi. Jumlah alokasi pembiayaan infrastruktur mencapai Rp42,2 triliun atau sebesar 69,4 persen dari total alokasi investasi pemerintah tersebut dimana pada akhir tahun 2017 telah direalisasikan sebesar 99,9 persen dari anggaran pembiayaan investasi tersebut. Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memperoleh alokasi pembiayaan investasi terbesar dari jumlah total tersebut yakni sebesar Rp32,1 triliun atau sekitar 52,8 persen. Alokasi lainnya adalah PMN sebesar Rp2,0 triliun guna mendukung PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka penugasan penyelenggaraan operasional prasarana dan sarana *Light Rapid Transit* (LRT) Jabodebek. Selain itu dialokasikan anggaran kewajiban penjaminan Rp1,0 triliun untuk mendukung penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional dan penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN. Selanjutnya, terdapat alokasi PMN sebesar Rp2,0 triliun pada PT SMI (persero) dan PT PII (persero) untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, proyek prioritas, atau KPBU.

*\*) Sampai dengan publikasi ini dirilis, angka realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 mengalami update dengan tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp4 triliun.*

# PERKEMBANGAN REALISASI APBNP 2017

(dalam triliun rupiah)



**PENDAPATAN NEGARA**  
1.655,8

*Pendapatan Negara*

1) Pendapatan dalam Negeri	Penerimaan * Perpajakan	2) Pendapatan Hibah
1.648,1	1.339,8	7,6
	PNBP	
	308,4	

dikurangi dengan



**BELANJA NEGARA**  
2.001,6

*Belanja Negara terdiri*

1) Belanja Pemerintah Pusat	Belanja K/L	2) Transfer ke Daerah dan Dana Desa	Transfer ke Daerah
1.259,6	798,6	742	682,2
	Belanja Non K/L		Dana Desa
	568,4		59,8

sama dengan



**SURPLUS (DEFISIT)**  
(345,8)

2,57% terhadap PDB

*ditutup dengan*

*pembiayaan Negara terdiri dari:*

1) Pembiayaan Utang	2) Pembiayaan Investasi	3) Pembiayaan Pinjaman	4) Kewajiban Penjaminan	5) Pembiayaan Lainnya
426,1	(59,8)	1,2	1,0	0,4



**PEMBIAYAAN ANGGARAN**  
364,5

*Pendapatan Negara - Belanja Negara + Pembiayaan Bunga Utang*



**KESEIMBANGAN PRIMER**  
(129,3)

\*) Sampai dengan publikasi ini dirilis, angka realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 mengalami update dengan tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp4 triliun.

# PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

**P**ertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 diperkirakan akan berada pada tingkat 5,05 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang 2017, aktivitas dan kinerja perekonomian terus menunjukkan perbaikan. Pada triwulan ketiga 2017, pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat 5,06 persen, lebih baik bila dibandingkan dengan dua triwulan sebelumnya dan triwulan ketiga pada tahun 2016.

**Kinerja positif perekonomian nasional didorong oleh faktor eksternal dan domestik.** Dari sisi eksternal, perbaikan kondisi perekonomian global, khususnya negara maju yang menjadi mitra dagang utama Indonesia telah mendorong peningkatan permintaan dan perbaikan harga global telah mendorong kinerja positif ekspor Indonesia dimana pada triwulan ketiga tumbuh signifikan sebesar 17,3 persen. Di sisi lain impor juga mencatatkan pertumbuhan yang signifikan terutama untuk kelompok bahan baku dan barang modal untuk mendukung ekspor. Hal ini mengindikasikan semakin menggalinya aktivitas perekonomian domestik. Dari

sisi internal, reformasi struktural yang telah dijalankan sejak awal pemerintah telah membuahkan hasil positif dalam upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat pada triwulan ketiga 2017 dimana investasi turut menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

**Peningkatan aktivitas investasi baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri telah mendorong Pembentukan Modal Tetap Bruto untuk tumbuh sebesar 7,1 persen pada triwulan ketiga 2017.** Realisasi investasi langsung hingga triwulan ketiga tercatat sebesar Rp513,2 triliun atau mencapai 75,6 persen dari total target 2017. Investasi portofolio juga menunjukkan perkembangan yang baik, antara lain ditunjukkan oleh kinerja Indeks Harga Saham Gabungan yang terus mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa dan ditutup pada level 6.355,7 atau meningkat sekitar 20 persen dibanding posisi penutupan pada tahun 2016. Peningkatan aktivitas ekspor dan investasi telah mendukung perbaikan kinerja sektor eksternal Indonesia, yang

tercermin dari penurunan defisit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus neraca pembayaran. Kondisi ini membantu terjaganya posisi cadangan devisa yang berada pada tingkat yang sehat dan menjadi penyanggah stabilitas ekonomi nasional terutama jika terjadi syok eksternal.

**Catatan kinerja positif perekonomian nasional telah mendorong peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.**

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terus menurun menjadi 5,5 persen. Implikasi positif juga terlihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata, yang ditunjukkan oleh data tingkat kemiskinan dan Rasio Gini yang terus menurun menjadi 10,6 persen dan 0,4.

**Selama tahun 2017 rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp13.384/US\$, relatif sesuai dengan angka asumsi APBN-P 2017 sebesar Rp13.400/US\$.** Didukung oleh pasar keuangan yang semakin dalam, tingkat volatilitas rupiah juga relatif stabil, walaupun sempat naik tajam di bulan September 2017 akibat isu pergantian pimpinan the Fed, reformasi perpajakan Amerika Serikat (AS), serta risiko geopolitik di Timur Tengah dan Semenanjung Korea. Program pemotongan pajak di Amerika Serikat (AS), diperkirakan menjadi isu penting

karena berpotensi mempengaruhi aliran dana ke negara-negara berkembang, termasuk ke Indonesia. Sementara itu, dampak kenaikan Federal Funds Rate (FFR) sebanyak tiga kali sebesar 75 basis points (bps) selama 2017 tidak terlalu besar terhadap rupiah karena diimbangi dengan masih diberlakukannya kebijakan *quantitative easing* di Eropa dan Jepang. Hal ini menyebabkan aliran dana ke Indonesia selama tahun 2017 masih positif, terutama disumbangkan oleh aliran dana masuk ke pasar surat utang negara (SUN) sebesar Rp170,34 triliun, lebih besar dari aliran dana keluar dari pasar saham sebesar Rp52,81 triliun.

**Aliran dana asing masuk ke pasar SUN tersebut juga berdampak pada rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan yang mencapai 5,0 persen di tahun 2017, sedikit lebih rendah dari angka asumsi APBN-P sebesar 5,2 persen.** Penurunan suku bunga ini konsisten dengan pelonggaran kebijakan moneter sejalan dengan rendahnya realisasi dan prakiraan inflasi ke depan yang masih di dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. Selain itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan juga dipengaruhi antara lain oleh implementasi berbagai paket kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi, sentimen positif terhadap kebijakan *front loading* dan peningkatan intensitas penerbitan SUN, serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat.

Secara umum, stabilitas pergerakan nilai tukar rupiah dan SPN 3 bulan lebih banyak dipengaruhi oleh semakin membaiknya fundamental perekonomian Indonesia, yang ditunjukkan oleh akselerasi pembangunan proyek-proyek infrastruktur, terjaganya tingkat inflasi, kuatnya cadangan devisa, surplusnya neraca perdagangan, peningkatan surplus transaksi modal dan finansial, dan membaiknya defisit transaksi berjalan.

Peningkatan rating utang Indonesia, termasuk kenaikan peringkat *Long Term Foreign* dan *Local Currency Issuer Default Rating* Indonesia menjadi BBB dari sebelumnya BBB- dengan outlook stabil oleh Fitch Ratings di Desember 2017, juga menjadi salah satu indikator terjaganya kepercayaan pemodal asing terhadap perekonomian nasional. Bauran kebijakan moneter, fiskal, dan makroprudensial, serta koordinasi yang baik antara pemerintah dengan Bank Indonesia juga berperan sangat besar dalam menjaga stabilitas rupiah dan penurunan tingkat suku bunga SPN 3 bulan.

**Stabilitas perekonomian Indonesia salah satunya dicerminkan oleh stabilitas harga atau inflasi.** Laju inflasi tahun 2017 dapat dikendalikan dan dijaga pada tingkat yang relatif rendah pada kisaran 3,6 persen (yoy). Pencapaian tingkat inflasi ini mampu menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Laju inflasi yang cukup

rendah tersebut terutama didukung oleh terkendalinya harga, terutama komoditas bahan pangan di sepanjang tahun. Kondisi fundamental penawaran dan permintaan juga dapat terjaga tercermin dari stabilnya inflasi inti yang berada pada kisaran level 3 persen (yoy). Meskipun komponen harga diatur pemerintah (*administered price*) sempat menekan di semester I 2017 sebagai konsekuensi penyesuaian subsidi agar lebih tepat sasaran, namun tekanan mulai mereda di semester II, seiring dengan tidak adanya kebijakan harga energi hingga akhir tahun.

**Catatan positif perekonomian nasional dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan reformasi struktural melalui berbagai paket kebijakan mendapatkan apresiasi positif dari berbagai lembaga internasional.** Sebagai contoh, dalam survey tentang EoDB, Bank Dunia mengapresiasi berbagai langkah pemerintah dalam menciptakan iklim investasi dan kemudahan berusaha dengan menaikkan peringkat Indonesia sebanyak 19 peringkat dari posisi 91 pada tahun 2016 menjadi 72 pada tahun 2017. Oleh karena itu, dalam 3 tahun terakhir, peringkat EoDB Indonesia telah meningkat sebanyak 48 tingkat, dan posisi Indonesia lebih baik dari negara-negara *peers* seperti Brazil, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Sejalan dengan itu, daya saing Indonesia juga membaik

yang ditunjukkan oleh kenaikan posisi *Global Competitiveness Index* sebanyak 5 peringkat. Beberapa pilar penilaian yang mendapatkan kenaikan skor antara lain infrastruktur, institusi, dan makroekonomi.

Apresiasi lembaga internasional atas kinerja perekonomian nasional dan berbagai langkah dan kebijakan pemerintah di tahun 2017 juga terlihat dari status layak investasi (*investment grade*) yang diberikan oleh lima lembaga rating dunia, yaitu Standard and Poor's, Moody's, Fitch, R&I, dan JCRA. Lebih jauh, lembaga pemeringkat Fitch telah meningkatkan skala peringkat *investment grade* dengan *outlook stable*. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian dan kerangka kebijakan Indonesia berada pada jalur yang baik sehingga kemampuan Indonesia dalam mengembalikan kewajiban (*creditworthiness*) dipandang membaik.

Capaian positif perekonomian nasional pada tahun 2017 dan berbagai pengakuan yang diraih Indonesia diharapkan dapat menjadi modal pemerintah untuk terus melakukan reformasi struktural dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik dan investor dalam menggerakkan roda perekonomian. Di tengah tantangan eksternal dan domestik yang masih tinggi, pemerintah juga akan terus memastikan terciptanya kebijakan yang kredibel dan efektif untuk mendukung agenda pembangunan

nasional, termasuk kebijakan fiskal melalui APBN yang kredibel.

Harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesian Crude Price (ICP)* merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan APBN. Perkembangan ICP mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia, terutama Brent Oil. Rata-rata ICP sepanjang tahun 2017 tercatat mengalami meningkat, yaitu mencapai US\$51,2 per barel lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang tercatat sebesar US\$40,2. Tren penurunan ICP sempat terjadi di semester I, dipengaruhi oleh peningkatan pasokan minyak dunia dan sumber energi alternatif. Meskipun begitu, ICP kembali meningkat di semester II seiring dengan peningkatan permintaan, penurunan cadangan minyak mentah dunia, serta faktor geopolitik internasional. Sementara itu, perkembangan lifting minyak dan gas bumi Indonesia hingga Desember 2017 adalah sebesar 803,8 ribu barel per hari (bph) dan 1.140,2 ribu barel setara minyak per hari (bsmph).

# PENDAPATAN NEGARA

## Penerimaan Pajak Tumbuh 15,5 persen, Seluruh Sektor Utama Tumbuh Positif

Penerimaan Pajak dalam triliun

Uraian	APBNP	Realisasi (sementara*)		
		Rp	% thd APBN-P	Δ% 2016 - 2017
Pajak Penghasilan	784.0	645.6	82.4%	-3.1%
- Migas	41.8	50.3	120.4%	39.4%
- Non Migas	742.2	595.3	80.2%	-5.5%
PPN & PPnBM	475.5	478.4	100.6%	16.0%
PBB	15.4	16.8	109.0%	-13.7%
Pajak Lainnya	8.7	6.7	77.0%	-16.8%
Jumlah	1,283.6	1,147.5	89.4%	3.8%

Penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai Rp 1.147,5 triliun\* atau 89,4 persen dari target APBNP 2017 dengan pertumbuhan yoy sebesar 3,8 persen. Secara umum pertumbuhan penerimaan pajak cukup baik seperti jenis pajak PPN yang tumbuh 16,0 persen dan PPh Migas yang tumbuh 39,4 persen.

Pertumbuhan penerimaan pajak lebih banyak dipengaruhi oleh Rp 122,7 triliun penerimaan pajak yang sifatnya tidak berulang yaitu penerimaan dari Uang Tebusan

Pengampunan Pajak dan PPh Final atas Revaluasi Aktiva Tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Penerimaan	Realisasi 2017 (triliun Rp)	Realisasi 2016 (triliun Rp)
Uang Tebusan Pengampunan Pajak	12.0	104.0
PPh Final Revaluasi Aktiva Tetap	-	18.7
<b>Jumlah</b>	<b>12.0</b>	<b>122.7</b>

\*) Sampai dengan publikasi ini dirilis, angka realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 mengalami update dengan tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp4 triliun



Apabila penerimaan yang sifatnya tidak berulang ini dikeluarkan dari perhitungan, maka pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2017 menjadi 15,5 persen.

Angka pertumbuhan di tahun 2017 merupakan kombinasi pertumbuhan positif di hampir semua jenis pajak, di antaranya adalah PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPN Dalam Negeri, dan PPh Final 1 persen (PP 46).

Pertumbuhan yang sangat pesat terjadi di segmen PPh Orang Pribadi, terutama terjadi pada segmen pembayar pajak orang pribadi peserta Amnesti Pajak.

Pertumbuhan yang tinggi juga terjadi di segmen PPh Final bagi Wajib Pajak dengan Penghasilan Bruto Tertentu (PPh Final 1 persen). Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya kontribusi sektor UMKM dan adanya perkembangan yang sehat di sektor ini.

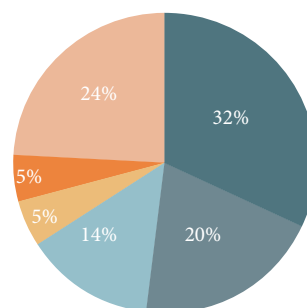
### Seluruh Sektor Utama Tumbuh Positif, Khususnya Industri Pengolahan dan Perdagangan

Secara keseluruhan, 5 sektor terbesar penerimaan pajak berkontribusi 76 persen dari total penerimaan. Adapun 5 sektor utama ini adalah sektor Industri Pengolahan (Manufaktur), Perdagangan (Besar & Eceran), Jasa Keuangan, Konstruksi, dan Pertambangan.

Kinerja pertumbuhan sektor utama di tahun 2017 cukup baik, secara agregat mencapai 16,59 persen. Pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh sektor Pertambangan yang tumbuh 39,3 persen seiring dengan membaiknya harga komoditas tambang. Sementara itu, 2 sektor terbesar yaitu Industri Pengolahan dan Perdagangan tumbuh positif masing-masing sebesar 17,1 persen dan 22,9 persen.

Jenis Pajak	y-o-y 2017	y-o-y 2016
PPh Badan	21.79%	-7.35%
PPh Orang Pribadi	47.32%	-35.66%
PPN Dalam Negeri	15.74%	-2.50%
PPh final 1%	36,19%	20,25%

Distribusi Sektoral



- Manufaktur
- Jasa Keuangan
- Pertambangan
- Perdagangan
- Konstruksi
- Lainnya

Sektor Usaha	y-o-y 2017	y-o-y 2016
Manufaktur	17.1%	1.2%
Perdagangan	22.9%	0.6%
Jasa Keuangan	13.4%	0.7%
Konstruksi	7.1%	-5.9%
Pertambangan	39.3%	-28.1%
<b>5 Sektor Utama</b>	<b>18.2%</b>	<b>-1.9%</b>

Pertumbuhan sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan memberikan indikasi yang positif terhadap kondisi perekonomian secara umum. Kondisi ini ditunjukkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang sifatnya transaksional (aktivitas tahun berjalan) seperti PPN Impor, PPh Pasal 22 Impor, dan PPN Dalam Negeri (Masa).

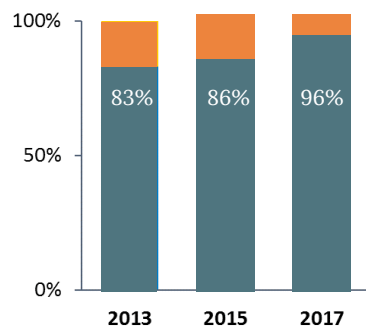
Khusus untuk sektor Perdagangan, pertumbuhan yang cukup signifikan juga terjadi pada jenis pembayaran PPh Final 1 persen yang menegaskan adanya peningkatan aktivitas ekonomi UKM dari sisi pembayaran pajak.

Peningkatan penerimaan pajak pada sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan menunjukkan sinyal positif aktivitas ekonomi baik dari sisi produksi (sektor Industri Pengolahan) maupun dari sisi distribusi (sektor Perdagangan). Sementara itu, potret ekonomi rakyat dari sisi penerimaan pajak terlihat dengan kinerja penerimaan PPh Final 1 persen (merupakan kewajiban pajak utama UKM) yang tumbuh lebih dari 30 persen. Hal ini menjadi gambaran awal masih kuatnya aktivitas ekonomi dan permintaan pada sektor tersebut, setidaknya dari sisi penerimaan pajak.

Pergerakan harga komoditas, khususnya komoditas tambang, yang cenderung menguat di pasar internasional menjadi salah satu

pendorong peningkatan kinerja penerimaan sektor Pertambangan. Hampir seluruh sub-sektor pertambangan tumbuh signifikan, khususnya sektor batu bara yang tumbuh lebih dari 70 persen. Sumber pertumbuhan ini berasal dari peningkatan pembayaran angsuran bulanan PPh Badan, peningkatan PPh Pasal 23 khususnya yang berasal dari pemanfaatan jasa pertambangan, dan peningkatan signifikan PPh Pasal 22 atas Ekspor Komoditas Minerba (tumbuh di atas 70 persen). Tingginya output dan aktivitas di sektor pertambangan sejalan dengan kinerja ekspor golongan barang Bahan Bakar Mineral yang berdasarkan data BPS sampai dengan November 2017 tumbuh 46,1 persen y-o-y. Dari sisi sub-sektor pertambangan migas, kinerja penerimaan di tahun 2017 merupakan dampak penguatan harga komoditas migas dan tingkat lifting yang terjaga; tercermin pada pertumbuhan penerimaan PPh Migas sebesar 39,4 persen.

Kepatuhan Formal (Penyampaian SPT PPh Tahunan)



Selain membawa tambahan penerimaan, program Pengampunan Pajak memberikan dampak positif bagi peningkatan kepatuhan formal dimana capaian rasio kepatuhan penyampaian SPT di tahun 2017 sebesar 96 persen atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelum program Pengampunan Pajak. Jumlah Wajib Pajak sendiri pada tahun 2017 ini mencapai 36 juta Wajib Pajak, atau naik 3,3 juta dibandingkan jumlah Wajib Pajak pada tahun 2016 (32,8 juta).

Di era digital ini, Direktorat Jenderal Pajak terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan administrasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah terus dilakukannya peningkatan kapasitas dan penyederhanaan aplikasi penyampaian SPT Tahunan secara elektronik (e-Filing). Dengan sosialisasi yang baik dan peningkatan kapasitas sistem yang terus dilakukan serta didorong oleh tingkat akses internet masyarakat yang semakin tinggi, pada tahun 2017 jumlah SPT Tahunan yang disampaikan melalui saluran e-Filing mencapai 77 persen dari total SPT Tahunan; meningkat dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 60 persen. Dari sisi jumlah SPT yang diterima melalui e-Filing, terjadi peningkatan hingga 30 persen dibandingkan dengan jumlah SPT e-Filing tahun 2016.

### **Inovasi Business Development Services**

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan WP secara umum, berbagai inovasi peningkatan layanan dan pembinaan terus dilakukan oleh DJP salah satunya melalui program UKM Sahabat Pajak dengan menggunakan pendekatan Business Development Services khususnya kepada para pelaku UKM dimana kepada para peserta program diberikan pembinaan pengembangan usaha seperti pelatihan pemasaran, pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana, asistensi pengajuan kredit ke bank, bantuan mendapatkan izin dari instansi terkait, hingga pendampingan dalam menyusun laporan dan membayar pajak secara online.

Melalui program Business Development Services ini, diharapkan para UKM dapat semakin berkembang dan maju sehingga pada gilirannya dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam bentuk peningkatan pembayaran pajak.

Sejauh ini program BDS yang telah mulai diterapkan pada beberapa KPP dan menunjukkan hasil yang sangat positif. Pembayaran pajak dari PPh Final PP 46 tumbuh 44 persen dan kepatuhan formal tumbuh 41 persen (pada KPP yang melaksanakan BDS). Program Business Development Services ini akan terus dikembangkan dan dievaluasi untuk penerapan secara nasional demi mendorong pertumbuhan UKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

## Amnesti Pajak

---

**P**ada tanggal 31 Maret 2017 program amnesti pajak di Indonesia yang telah dijalankan selama sembilan bulan sejak 1 Juli 2016 berakhir. Program tersebut secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil dengan menilik beberapa indikator di antaranya berupa nilai repatriasi harta yang dilaporkan sebesar Rp146 triliun dan Uang Tebusan yang mencapai Rp116 triliun (Rp114 triliun di tahun 2016 dan Rp 12 triliun di tahun 2017) atau sekitar 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2016. Penerimaan dari Uang Tebusan ini belum memperhitungkan pelunasan utang pajak dalam rangka kepesertaan program amnesti yang nilainya mencapai Rp 18 triliun (Rp 10 triliun di tahun 2016 dan Rp 8 triliun di tahun 2017). Capaian tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan hasil amnesti yang telah dijalankan di Indonesia sebelumnya, maupun capaian amnesti negara-negara lain di dunia. Dari sisi kepesertaan, tercatat dalam sejarah bahwa terdapat sebanyak 973.426 Wajib Pajak yang berpartisipasi dengan mendeklarasikan harta setara Rp4.884 triliun.

Kesuksesan program amnesti pajak di Indonesia kali ini tidak lepas dari dukungan besar semua pihak di kalangan pemerintah, parlemen, perbankan, dunia usaha, praktisi dan publik pada umumnya. Tak kurang dari 10.000 kali kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh DJP di seluruh wilayah Indonesia

bekerjasama dengan banyak pihak dihadiri dengan antusias (KBRI) dan masyarakat diaspora Indonesia.

Sebagai salah satu momentum peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia, beberapa indikasi awal telah menunjukkan tanda-tanda positif. Menurut data terakhir pada tahun 2017 ini, terdapat lebih dari 870 ribu Wajib Pajak peserta amnesti pajak yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Secara total berarti angka kepatuhan pada kelompok ini berada pada angka 89,4 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan. Yang lebih menggembarakan adalah bahwa tingginya tingkat kepatuhan tersebut terjadi secara merata di seluruh wilayah di Indonesia. Fakta ini terkonfirmasi dari rentang kepatuhan formal partisipan amnesti secara nasional pada kisaran 84,7 persen hingga 93,5 persen.

Capaian amnesti pajak yang lain adalah secara tidak langsung mendorong masuknya investasi, terutama dari negara-negara di mana Wajib Pajak selama ini menyimpan asetnya. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa pada akhir tahun lalu terjadi kenaikan investasi modal asing secara rata-rata sebesar 87,9 persen dari lima negara ataupun wilayah administrasi asal repatriasi. Jumlah investasi dari lima negara ini memiliki andil sebesar 53,34 persen dari total investasi negara-negara asing yang masuk ke Indonesia pada tahun tersebut. Melalui langkah-langkah pascaamnesti yang tepat, tegas dan berkeadilan, sistem perpajakan Indonesia di masa yang akan datang diharapkan semakin baik kontribusinya sebagai sumber pendanaan negara yang kokoh dan berkesinambungan.

## Kepabeanaan dan Cukai

**P**embangunan dan modernisasi dalam berbagai aspek kehidupan terus digalakkan sebagai langkah nyata mencapai Nawacita untuk Indonesia yang berdaulat secara politik dan mandiri dalam bidang ekonomi serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta memajukan kemandirian ekonomi yang menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal serta memberikan fasilitas kepada industri dalam negeri sehingga dapat berdaya saing tinggi.

Berbagai langkah strategis dan inovatif telah dilakukan oleh DJBC untuk menjadi institusi yang kredibel. Perjalanan reformasi DJBC tidak berhenti pada saat pencanangan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (TPRKC) di akhir tahun 2016. Karena semangat reformasi ini ditujukan untuk memberantas perdagangan ilegal, menciptakan pelayanan yang bebas dari praktik pungutan liar dan korupsi serta meningkatkan kepuasan pengguna jasa.

Reformasi dalam bentuk penyempurnaan sistem manajemen kinerja kantor modern, yang

berbasis otomasi sistem pengawasan dan pelayanan serta integrasi sistem manajemen risiko, dilakukan serentak di 16 kantor wilayah dan 3 kantor pelayanan utama dalam bentuk 19 inisiatif strategis, 88 program terobosan, dan 650 rencana aksi.

Optimalisasi dan efisiensi pelayanan serta usaha memudahkan para pengguna jasa dalam melakukan kegiatan kepabeanaan dan cukai juga terus ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan dengan mengembangkan lebih dari 40 sistem informasi elektronik yang memanfaatkan teknologi terkini seperti sistem aplikasi berbasis web serta mobile.

DJBC tentunya menyadari bahwa dalam menjalankan reformasi tidak bisa dilakukan sendiri, namun perlu dilakukan sinergi dengan instansi pemerintah lainnya. Sinergi dilakukan berupa komitmen bersama pada tanggal 12 Juli 2017 antara Menteri Keuangan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, KPK, PPATK dan Kantor Staf Presiden.

Komitmen tersebut digunakan DJBC untuk sekaligus mencanangkan program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) termasuk juga program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dengan tujuan meningkatkan iklim bisnis yang

sehat, memberantas perdagangan ilegal serta praktik penghindaran fiskal dan pemenuhan perizinan barang larangan dan/atau pembatasan (lartas).

Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun telah dilakukan, dalam bentuk *Joint Analysis* dan Audit serta integrasi proses bisnis. Termasuk didalamnya adalah pembentukan single identity dan business profile yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kementerian dan lembaga lain untuk kepentingan integrasi data.

Hasil program reformasi (PIBT dan PCBT) yang mengusung *tagline* “legal itu mudah” berhasil mendorong kepatuhan para pengguna jasa dalam menjalankan usahanya secara legal, serta indikator lainnya seperti peningkatan pembayaran per Teus yang naik 26 persen, peningkatan *taxbase* per Teus sekitar 40 persen, penurunan jumlah entitas IBT per hari sebesar -28 persen, dan penurunan aktifitas IBT (jumlah PIB turun -44 persen dan Teus -33 persen).

Mendukung program inovatif dan strategis, DJBC secara konsisten melakukan pengawasan terhadap pelanggaran diberbagai sektor kepabeanan dan cukai. Jumlah penindakan yang naik secara signifikan setiap tahun terhadap keluar masuknya barang ilegal seperti narkoba, flora dan fauna dilindungi, barang-barang terkait kegiatan terorisme dan kejahatan internasional lainnya serta peredaran barang kena cukai lainnya, dapat dijadikan bukti nyata.

<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
10.009 Kasus	14.890 Kasus	24.036 Kasus

DJBC juga berperan aktif disektor perdagangan, yaitu dalam menciptakan kemudahan berbisnis di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya peringkat kemudahan melakukan usaha di Indonesia (EoDB) dari tahun ke tahun.

<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2017</b>
peringkat 106	peringkat 91	peringkat 72

Peran aktif itu bukan tanpa alasan, karena Bank Dunia lah yang mencatat kontribusi DJBC terhadap kenaikan peringkat tersebut. Kontribusi itu terkait sistem *single billing / single payment dalam* pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), yang dianggap sebagai kunci kinerja *trading accross border* atau perdagangan lintas negara.

Disektor industri DJBC juga berperan aktif mendukung pembangunan industri nasional melalui insentif fiskal dan prosedural, antara lain:

No	FASILITAS	JUMLAH
1.	Fasilitas Bea Masuk Di Tanggung Pemerintah (BMDTP)	129 Perusahaan
2.	Fasilitas Pertambangan	58 Perusahaan
3.	Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	369 Perusahaan
4.	Kawasan Berikat (KB)	1.403 Perusahaan
5.	Gudang Berikat (GB)	231 Perusahaan
6.	Pusat Logistik Berikat (PLB)	50 Perusahaan
7.	Toko Bebas Bea (TBB)	27 Perusahaan
8.	Tempat Penimbunan Berikat Lainnya	8 Perusahaan
9.	Kawasan Ekonomi Khusus <sup>1</sup>	12 KEK
10.	User Specific Duty Free Scheme	106 Penetapan
11.	Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor	356 Penetapan
12.	Sertifikasi Authorized Economic Operator	80 Perusahaan
13.	Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah	129 Perusahaan

Dalam usahanya meningkatkan kemudahan pelayanan kepada pengguna jasa khususnya IKM, DJBC berinisiatif membentuk klinik bersama pelayanan dan perizinan impor dengan instansi terkait dalam satu sistem teknologi informasi yang terintegrasi.

DJBC sebagai instansi dibawah Kementerian Keuangan tentunya bertanggung jawab mengumpulkan penerimaan negara. Penerimaan tersebut berupa BM, Bea Keluar (BK) dan Cukai serta PDRI. Kunci keberhasilan pencapaian target penerimaan, diindikasikan sebagai dampak dari program PIBT/PCBT yang berjalan baik, kenaikan tarif cukai rokok, dan inovasi-inovasi yang digulirkan program reformasi DJBC.



Penerimaan kepabeanan dan cukai di tahun 2017 adalah Rp192,3 triliun atau 101,7 persen dari target APBNP Rp189,1 triliun, yang terdiri dari:

---

BM	:	Rp35 triliun atau 105,0 persen (surplus Rp1,7 triliun) dari APBNP 2017 yaitu Rp33,3 triliun,
BK	:	Rp4,1 triliun atau 149,9 persen (surplus Rp1,4 triliun) dari APBNP 2017 yaitu Rp2,7 triliun,
Cukai	:	Rp153,3 triliun atau 100,1 persen (surplus Rp0,1 triliun) dari APBNP 2017 yaitu Rp153,2 triliun.

---

Sedangkan PDRI yang berhasil dikumpulkan sepanjang tahun 2017 adalah Rp195,0 triliun atau tumbuh 19,2 persen dibanding tahun lalu Rp164,3 triliun. Sehingga total penerimaan DJBC di tahun 2017 adalah Rp387,9 triliun atau berkontribusi sebesar 29,0 persen dalam penerimaan perpajakan.

Kerja keras dan semangat jajaran DJBC, untuk menjadikan instansi ini semakin baik, mendapatkan

apresiasi dari masyarakat diantaranya penganugerahan penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA). Anugerah ini merupakan amanah sekaligus tantangan bagi DJBC untuk secara totalitas dan konsisten mempertahankan bahtera reformasi berkembang sampai tujuannya guna mewujudkan bea cukai yang benar-benar profesional, terpercaya, dan dicintai rakyat.

## Penertiban Importir Beresiko Tinggi (PIBT)

**P**eluncurkan program Penertiban Importir Borongan (PIBT) adalah sebagai rangkaian perbaikan yang tengah dijalankan DJBC dalam wujud Program Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC). Diawali deklarasi Menteri Keuangan bersama para pimpinan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Pimpinan KPK, dan Ketua PPATK pada tanggal 12 Juli 2017 yang lalu.

Setidaknya ada tiga alasan kenapa program PIBT ini menjadi penting. Pertama, IBT menyebabkan banyaknya beredar barang-barang ilegal yang membuat persaingan tidak sehat dan mengancam industri dalam negeri. Kedua, terdapat ancaman masuknya barang-barang berbahaya ke masyarakat yang tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh kementerian/ lembaga (K/L) terkait. Terakhir, dari sisi penerimaan, perilaku ini dapat berdampak pada penerimaan negara dari pajak impor yang tidak optimal.

Secara umum, IBT dapat diartikan sebagai kegiatan importasi yang didalamnya cenderung terjadi pelanggaran ketentuan. Dirjen Bea dan Cukai, Heru Pambudi, menyampaikan bahwa terdapat dua modus yang kerap digunakan, yaitu pemberitahuan harga yang lebih rendah dari harga seharusnya (under invoicing) dan penghindaran izin impor. Meskipun jumlah

entitasnya hanya sedikit (sekitar 5 persen), namun dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, baik dari aspek penerimaan negara maupun aspek lainnya. Oleh karena itu, praktik tersebut diawasi dengan ketat oleh Bea Cukai, salah satunya dengan pemeriksaan fisik secara lebih mendalam.

Program PIBT telah menghasilkan beberapa indikasi positif. Diantaranya tampak dari jumlah entitas yang melakukan kegiatan IBT yang mengalami penurunan. Hal itu bisa disebabkan karena tidak aktif maupun terblokir, melalui kerja sama antara DJBC dan DJP. Begitu pula dengan jumlah dokumen dan volume impor yang dilakukan.

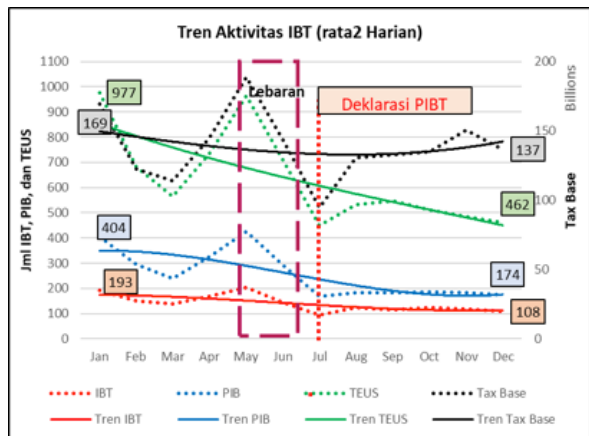
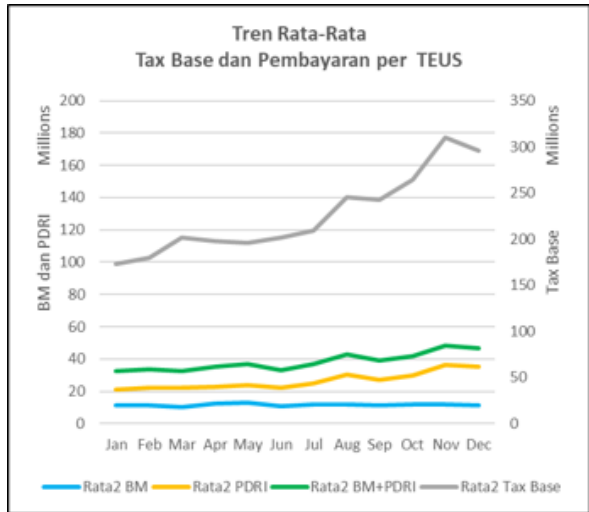
Sinyal-sinyal perbaikan pun muncul dari aspek fiskal maupun non-fiskal. Dari aspek fiskal yaitu penurunan aktivitas IBT yang disertai dengan kenaikan tax base (devisa impor). Kenaikan tax base ini selanjutnya mendorong peningkatan penerimaan negara dari pajak impor yang dipungut oleh DJBC, yang terdiri dari Bea Masuk, PPN, dan PPh impor.

Dari aspek non-fiskal, DJBC telah diberikan berbagai kemudahan dalam hal perizinan. Diantaranya dengan pemberian kemudahan, dalam bentuk penyederhanaan izin impor produk besi baja dan produk tekstil. DJBC juga menyiapkan skema Pusat Logistik Berikat (PLB) guna memberikan kemudahan

bagi IKM dalam memenuhi kebutuhan logistiknya. Diharapkan IKM dapat membeli bahan baku impor dalam partai kecil untuk kebutuhan produksinya. Selanjutnya mengirimkan produk jadinya dalam partai kecil untuk kemudian di ekspor secara konsolidasi (bersama-sama).

Dampak positif PIBT secara makro pun mulai dirasakan. Berdasarkan informasi dari Ditjen IKM Kementerian Perindustrian, IKM dalam negeri mengalami pertumbuhan sekitar 30 persen pasca program PIBT. Selain itu, berdasar testimoni asosiasi pengguna jasa, terdapat beberapa perusahaan yang menaikkan jumlah investasinya dalam rangka peningkatan kapasitas produksi.

Heru Pambudi berharap ke depan, DJBC dengan berkoordinasi bersama kementerian/lembaga akan terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan, baik di tataran teknis operasional maupun kebijakan yang bersifat makro. Dia juga menegaskan bahwa program PIBT ini akan terus dilakukan oleh jajarannya sampai terwujud praktik perdagangan yang sehat, fair, taat aturan, dan bebas korupsi/pungli.



Periode	IBT / Hari	PIB / Hari	TEUS / hari	TAX-BASE (Juta Rp)	BM / TEUS (Juta Rp)	PDRI / TEUS (Juta Rp)	BM+PDRI / TEUS (Juta Rp)
Sebelum (1 Jan - 12 Jul)	162	321	755	191	11.74	22	34
Sesudah (13 Jul - 21 des)	117	179	504	267	11.79	31	43
Naik / Turun) Persen	-28 %	-44 %	-33 %	40 %	0.39 %	39 %	26%

## Penerimaan Negara Bukan Pajak

---

Mengawal  
Pelaksanaan  
Anggaran  
Belanja K/L  
untuk Menjaga  
Ketercapaian  
Output,  
Kredibilitas  
Fiskal, dan  
Simplifikasi  
Pertanggung-  
jawaban  
Pelaksanaan  
Anggaran

Sampai dengan bulan Desember 2017 realisasi PNBPN mencapai Rp308,4 triliun atau 118,5 persen dari APBNP 2017. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 17,7 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini antara lain disebabkan meningkatnya harga komoditas khususnya harga mineral dan batubara serta minyak bumi hingga akhir Desember 2017.

Realisasi penerimaan SDA Migas mencapai Rp82,4 triliun atau 114,1 persen dari targetnya dalam APBNP 2017. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 86,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016. Kenaikan penerimaan SDA Migas tersebut, antara lain disebabkan karena realisasi rata-rata ICP tahun 2017 mencapai USD51,2/barel lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang

mencapai USD38,9/barel. Realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp28,6 triliun atau 122,0 persen terhadap APBNP 2017. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 37,4 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016. Kenaikan penerimaan SDA Non Migas terutama disebabkan kenaikan rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) tahun 2017 yang mencapai US\$85,9 per ton, lebih tinggi dibandingkan HBA pada tahun 2016 sebesar US\$58,2 per ton.

Realisasi penerimaan Bagian Laba BUMN mencapai Rp43,9 triliun atau 107,1 persen terhadap APBNP 2017. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 18,2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016. Kenaikan penerimaan Bagian Laba BUMN terutama dipengaruhi perbaikan kinerja BUMN.

Uraian	APBNP 2017	Realisasi		% Growth (yoy)
		s.d. Des 2017	%	
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	260.242,15	308.361,99	118,49	17,71
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	95.643,15	110.990,55	116,05	71,01
i. Migas	72.207,89	82.394,12	114,11	86,86
ii. Non Migas	23.435,26	28.596,43	122,02	37,43
b. Bagian Laba BUMN	41.000,00	43.903,88	107,08	18,23
c. PNBP Lainnya	85.057,56	108.762,40	127,85	(7,82)
d. Pendapatan BLU	38.541,44	44.705,16	115,99	6,58

Adapun penurunan terjadi pada realisasi penerimaan PNBP lainnya. Realisasi mencapai Rp108,8 triliun atau 127,9 persen terhadap APBNP 2017. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 7,8 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yang mencapai Rp118,0 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan adanya penurunan realisasi Pendapatan

Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia (tahun 2016 Rp18,2 triliun sedangkan tahun 2017 Rp1,7 triliun), meskipun disisi lain terdapat kenaikan dari pendapatan kepolisian dan pendapatan penggunaan spektrum dan frekuensi radio yang cukup signifikan .

# BELANJA NEGARA

## Belanja Pemerintah Pusat

Mengawal Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L untuk Menjaga Ketercapaian Output, Kredibilitas Fiskal, dan Simplifikasi Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran

**B**elanja negara pada APBNP 2017 sebesar Rp2.133,3 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.367,0 triliun, terbagi atas anggaran untuk belanja K/L sebesar Rp798,6 triliun, belanja non K/L sebesar Rp568,4 triliun, serta anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,3 triliun. Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN-P 2017 mengalami defisit anggaran sebesar Rp397,2 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Besarnya belanja negara dan potensi defisit anggaran pada APBNP TA 2017 harus diimbangi dengan kebijakan strategis pelaksanaan anggaran dan pengendalian belanja khususnya di tingkat K/L agar belanja pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan efisien dalam upaya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan nasional.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja APBN, pada awal TA 2017, Menteri Keuangan melalui surat nomor S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017 telah merumuskan 4 (empat) hal penting untuk menjamin pelaksanaan anggaran yang lebih baik dan terkendali, yaitu:

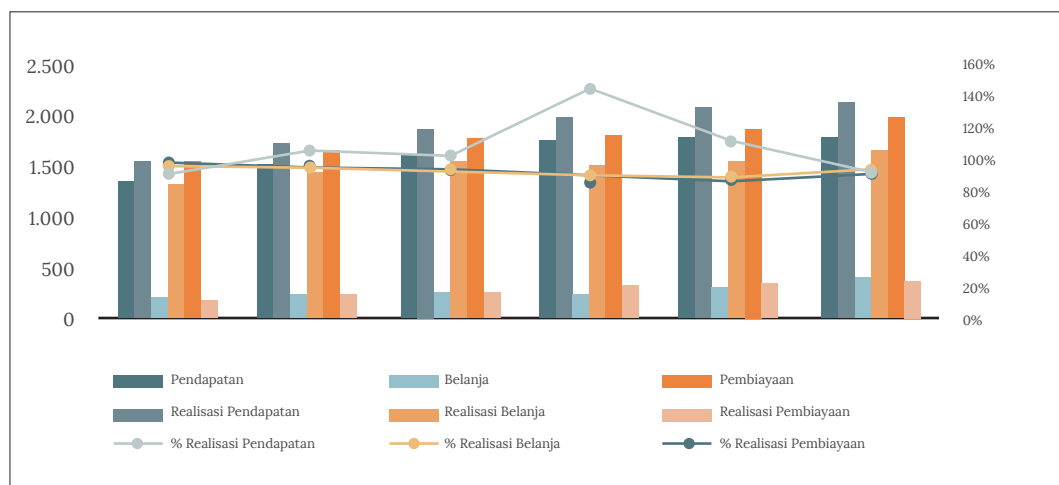
1. Melakukan reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan pencapaian kinerja;
2. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan;
3. Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak; dan
4. Mengendalikan pengelolaan Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Kombinasi kebijakan pelaksanaan anggaran tersebut dipadukan dengan upaya simplifikasi pertanggungjawaban LPJ/SPJ terutama pada penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah, sehingga eksekusi belanjanya dapat memberikan dampak yang lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh para penerima manfaat. Kebijakan pelaksanaan anggaran tersebut dilaksanakan sampai dengan level Satuan Kerja (satker) dan dikawal oleh Kanwil DJPb dan KPPN di seluruh Indonesia, sehingga diharapkan APBN akan terjaga dan mampu untuk memitigasi pelebaran risiko fiskal. Selain itu, kebijakan strategis pelaksanaan anggaran tersebut membuat APBN semakin kredibel dan berdaya tahan dengan tetap fokus untuk menjaga kualitas belanja yang efektif dan efisien, menjaga likuiditas kas negara dan memastikan semua tagihan dapat dibayarkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, serta menjaga pelaksanaan anggaran agar sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang taat asas.

Berawal dari pemantapan strategi pelaksanaan anggaran sejak awal tahun, maka penyaluran belanja negara semakin berkualitas dan terkendali dengan tetap memfokuskan pada ketercapaian output program-program prioritas nasional. Hal ini dapat terlihat dari capaian kinerja pelaksanaan APBN 2017 yang semakin baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data rilis sementara atas realisasi anggaran tahun 2017, pada sisi realisasi belanja negara telah mencapai Rp 2001,6 triliun atau setara, dengan 93,8 persen dari total belanja APBN 2017. Hal ini didukung pula dengan tren positif dari realisasi belanja modal yang telah mencapai 92,8 persen dibandingkan tahun 2016 yang hanya terealisasi sebesar 82 persen. Pada belanja barang telah terjadi peningkatan realisasi yang mencapai 96,8 persen, jika dibandingkan tahun 2016 belanja barang hanya terserap sebesar 85,3 persen, dan pada belanja bantuan sosial realisasi telah mencapai 100 persen. Jadi, secara umum tingkat penyerapan dan eksekusi belanja tahun 2017 jauh lebih baik.



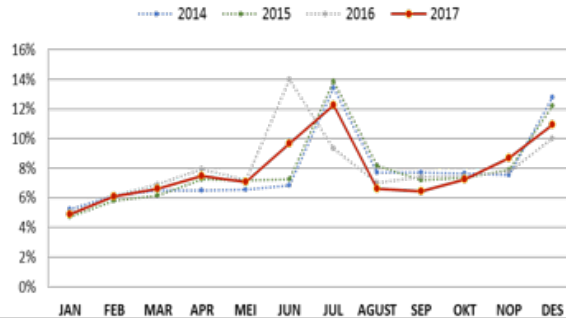
Uraian	Tahun Anggaran					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pendapatan	1.358,2	1.502,0	1.635,3	1.761,6	1.786,2	1.736,1
Belanja	1.548,3	1.726,2	1.876,8	1.984,1	2.082,9	397,2
Pembiayaan	190,1	224,2	241,5	222,5	296,7	397,2
Realisasi Pendapatan	1.338,1	1.438,9	1.550,4	1.508,0	1.555,9	1.655,7
Realisasi Belanja	1.491,4	1.650,5	1.777,2	1.806,5	1.864,2	2.001,6
Realisasi Pembiayaan	175,1	237,3	248,9	323,1	334,5	364,5
% Realisasi Pendapatan	98,52%	95,80%	94,81%	85,60%	87,11%	95,37%
% Realisasi Belanja	96,33%	95,61%	94,69%	91,05%	89,50%	93,83%
% Realisasi Pembiayaan	92,11%	105,84%	103,06%	142,21%	112,74%	91,77%



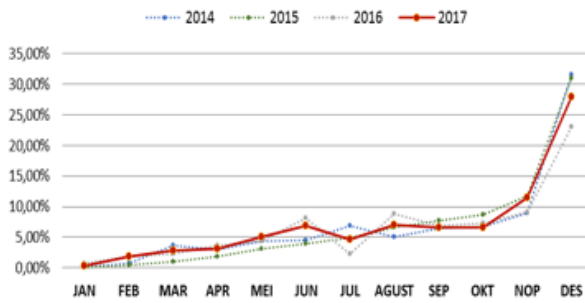
Penyerapan yang meningkat ini menghasilkan output yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara dan rel kereta api. Di bidang pendidikan, outputnya dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penyaluran beasiswa Bidik Misi. Sedangkan di bidang kesehatan dan perlindungan sosial terwujud dalam bentuk manfaat Kartu Indonesia Sehat dan Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa output infrastruktur telah dibangun jalan 794 km, jembatan 9.072 meter, pembangunan 3 bandara, lanjutan proyek multi years 8 bandara, dan rel kereta api telah dibangun 618,3 km. Di bidang pendidikan, untuk penyaluran Kartu Indonesia Pintar mencapai 19,8 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah untuk 8 juta siswa, penyaluran Bidik Misi untuk 364,4 ribu mahasiswa dan di bidang kesehatan serta perlindungan sosial, Kartu Indonesia Sehat mencakup 92,1 juta jiwa dan PKH penerima manfaatnya 6 juta jiwa.

Dilihat dari tren penyerapan anggaran sepanjang tahun 2017, maka pola realisasi anggaran pada semua jenis belanja terlihat lebih baik dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya (2014-2016). Semua jenis belanja mengalami peningkatan realisasi sejak awal tahun dan bergerak secara progresif dengan tren yang positif, sehingga pada akhir TA 2017 yakni di bulan Desember 2017 penumpukkan pencairan belanja dapat ditekan secara signifikan. Hal ini lebih terlihat dari tren penyerapan anggaran pada belanja barang dan bansos tahun 2017 dimana penyerapan anggaran pada akhir tahun 2017 tidak sebesar tingkat penyerapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Belanja barang tidak melonjak di Desember karena sejak awal tahun telah terealisasi cukup merata, sedangkan belanja bansos direalisasikan signifikan pada bulan Mei, Agustus dan hampir 100 persen terealisasi di November, sehingga tidak ada lonjakan signifikan di Desember 2017.

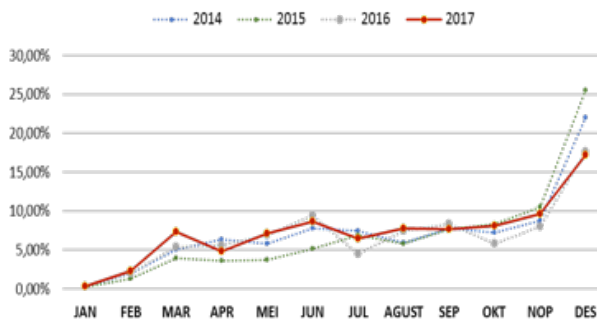
Tren Realisasi Belanja Pegawai (%)



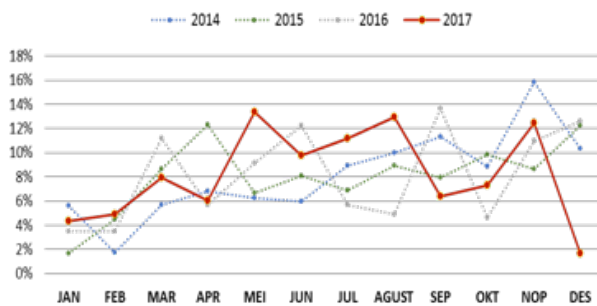
Tren Realisasi Belanja Modal (%)



Tren Realisasi Belanja Barang (%)



Tren Realisasi Belanja Bansos (%)



## Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

---

Perubahan mekanisme penyaluran DAK fisik dan Dana Desa guna mendorong *good governance* pada pemerintah daerah.

**D**alam rangka percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional serta implementasi pelaksanaan program Nawacita ketiga, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dalam APBN. DAK Fisik merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sejak tahun 2017 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa, sebelumnya mekanisme pelaksanaan penyaluran, pemantauan, dan evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan secara terpusat oleh DJPK menjadi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui 171 Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di seluruh Indonesia, yang berperan selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah kerjanya masing-masing. Perubahan ini bertujuan untuk:

- a. Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah Daerah melalui 171 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia;
- b. Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan; dan
- c. Meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.

Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan dalam 4 Triwulan, yaitu Triwulan I (30 persen), Triwulan II (25 persen), Triwulan III (25 persen) dan Triwulan IV sebesar selisih antara dana yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu Tahap I sebesar 60 persen dan Tahap II sebesar 40

persen. Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sesuai tahapannya memperhatikan kinerja penyerapan anggaran dan ketercapaian output atas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahap/triwulan sebelumnya.

Monitoring kinerja penyerapan anggaran dan ketercapaian output ini dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi berbasis web (Aplikasi OMSPAN). Hal ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa sesuai target output yang direncanakan, peningkatan efisiensi penyaluran serta meningkatkan good governance melalui verifikasi atas laporan penyerapan dan capaian output oleh KPPN setempat. Selain meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, mekanisme yang

mensyaratkan penyaluran secara bertahap dan memperhatikan kinerja akan mendorong Pemerintah Daerah untuk segera melaksanakan kegiatan sehingga dapat menjadi penggerak roda perekonomian di daerah.

Sampai dengan akhir tahun 2017, telah terealisasi penyaluran DAK Fisik kepada 541 Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia sebesar Rp62,1 triliun atau 89,3 persen dari total pagu Rp69,5 triliun. Sementara itu, penyaluran Dana Desa kepada 434 Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia mencapai Rp59,8 triliun atau 99,6 persen dari total pagu Rp60,0 triliun. Rincian realisasi penyaluran DAK Fisik sampai dengan akhir tahun 2017, sebagai berikut:

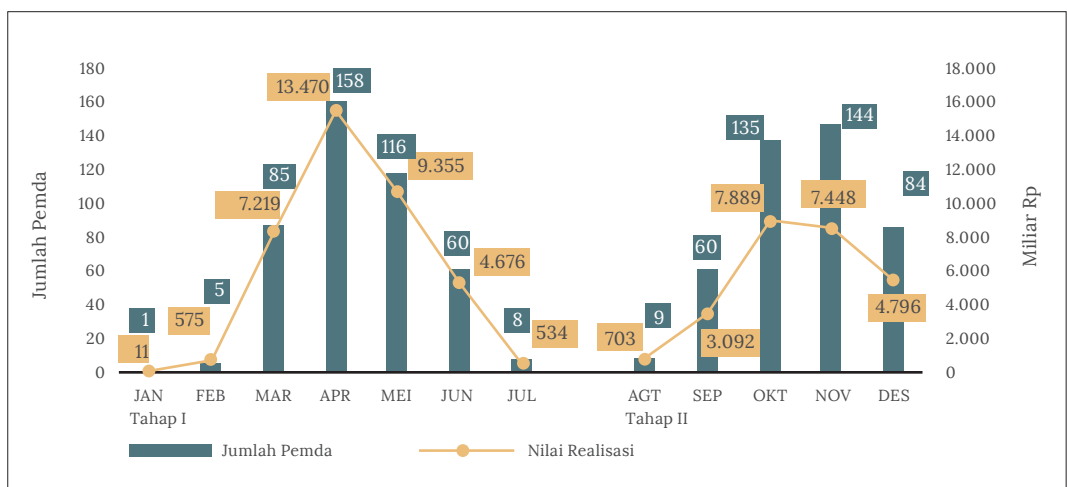
Jenis DAK Fisik	Pagu		Realisasi	
	Pemda	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)
DAK Fisik Bertahap	541	58.163.176.359.000	50.932.542.076.150	87,57 %
DAK Fisik Sekaligus	203	179.034.077.000	154.730.075.232	86,42 %
Percepatan Infrastruktur	56	1.956.000.000.000	1.884.266.268.496	96,33 %
Penyelesaian 2016	435	9.233.290.000.000	9.135.653.760.474	98,94 %
Jumlah		69.531.500.436.000	62.107.192.180.352	87,57 %

Rincian realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun 2017, sebagai berikut:

Uraian	Pagu			Realisasi			
	Pemda	Desa	Nilai (Juta Rupiah)	Pemda	Desa	Nilai (Rp.)	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(4)
Tahap I	434	74.954	36.000.000	434	74.882	35.838.860.463.051	99,6 %
Tahap II	434	74.882	24.000.000	432	74.673	23.927.977.523.351	99,7 %
Total	434	74.954	60.000.000	434	74.882	59.766.837.986.402	99,6 %

Atas penyaluran Dana Desa TA 2017 sampai dengan 13 Desember 2017, bahwa berdasarkan analisa terhadap penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana grafik di bawah ini, dapat disimpulkan bahwa saat penyaluran Dana Desa tahap I TA 2017 dimulai pada bulan April 2017, sebanyak 250 Pemda (57,6 persen dari 434

Pemda) telah menyampaikan dokumen persyaratan tahap I kepada DJPK. Potensi jumlah Pemda yang menyampaikan dokumen persyaratan di awal tahun akan semakin banyak, apabila persyaratan penyaluran disederhanakan. Dengan demikian, jadwal penyaluran Dana Desa tahap I TA 2018 dapat dimajukan dari Maret menjadi Januari.



Berdasarkan analisa terhadap penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa saat periode penyaluran dimulai pada bulan Agustus 2017, hanya 9 Pemda (2 persen dari 434 Pemda) yang menyampaikan dokumen persyaratan, sebagian besar Pemda menyampaikan persyaratan penyaluran pada bulan Oktober dan November 2017. Hal ini disebabkan Pemda kesulitan memenuhi persyaratan penyaluran berupa realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD minimal sebesar 90 persen dari Dana Desa yang telah diterima. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat dipertimbangkan untuk mengubah persyaratan minimal persentase realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD semula 90 persen menjadi 75 persen.

Dari realisasi penyaluran DAK Fisik tersebut, Pemerintah telah berhasil mencapai output strategis, antara lain melakukan rehabilitasi 19.120 unit ruang belajar/sarana sekolah dan membangun 5.031 ruang kelas baru. Selain itu, ditingkatkan pula kualitas 3.104 unit sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas. Pemerintah juga telah berhasil membangun dan merehabilitasi sarana irigasi untuk 484 ribu hektar lahan pertanian, serta menyediakan akses air minum bagi 273 ribu rumah tangga.

Selanjutnya, dalam rangka penggunaan Dana Desa untuk pembangunan, antara lain telah dapat dihasilkan capaian output berupa 107 ribu km jalan desa, peningkatan kualitas 89 ribu unit pos kesehatan, pembangunan 178 ribu unit sarana mandi cuci kakus (MCK), 107 ribu unit sarana air bersih, serta 25 ribu hektar sarana irigasi.

## PEMBIAYAAN UTANG

	APBNP	Realisasi		% Growth yoy
		Dec-17	% APBNP	
<b>VI. Pembiayaan Utang</b>	<b>426,988.3</b>	<b>426,115.3</b>	<b>99.8%</b>	<b>11.5%</b>
1. Surat Berharga Negara (Neto)	432,959.0	441,826.3	102.0%	11.1%
2. Pinjaman (neto)	(6,003.7)	(15,711.0)	261.7%	2.4%
a. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	1,700.0	385.9	22.7%	-44.1%
i. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	2,500.0	1,042.7	41.7%	15.4%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(767.0)	(656.8)	85.6%	209.1%
b. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(7,703.7)	(16,096.9)	209.0%	0.4%
i. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	57,500.3	49,008.0	85.2%	33.7%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN	(65,204.0)	(65,105)	99.8%	23.6%

**A**danya penyesuaian defisit APBNP berpengaruh terhadap pengelolaan pembiayaan melalui penyesuaian penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Dengan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati (*prudent*), SBN yang diperdagangkan di pasar keuangan berhasil menutup defisit APBNP 2017 sejumlah Rp441,8 triliun hingga akhir Desember 2017. Kondusifnya kondisi pasar keuangan, semakin mendukung Pemerintah untuk menerbitkan SBN. Terlebih lagi setelah S&P dan Fitch menaikkan peringkat layak investasi Indonesia. Kenaikan peringkat ini mendapat respon positif dari pelaku pasar.

Sejak pengumuman kenaikan peringkat tersebut yield SUN global maupun domestik mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dengan kondisi yang kondusif ini Pemerintah dapat menutup defisit APBNP secara optimal melalui keberhasilan penerbitan SBN.

Selain untuk menutup defisit, SBN juga berperan dalam pembiayaan infrastruktur. Peran SBN dalam pembiayaan infrastruktur secara nyata dapat dilihat dari berbagai proyek yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk), khususnya Project Financing Sukuk. Untuk tahun 2017, terdapat



Kementerian yang proyeknya dibiayai oleh Sukuk, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan.

Kementerian PUPR mengalokasikan pembiayaan Sukuk untuk penyelesaian 188 bendungan demi mendukung ketahanan air dan pangan nasional serta 88 proyek untuk membangun jalan, jalan layang, terowongan, dan jembatan di pulau Sumatra, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan pagu keseluruhan sebesar Rp7,4 triliun.

Sementara untuk Kementerian Agama, Sukuk digunakan untuk mendanai pembangunan/ pengembangan asrama haji sejumlah 11 embarkasi. Calon haji diharapkan dapat tertangani dengan baik melalui adanya pengembangan ini. Sukuk juga membiayai rehabilitasi/ pembangunan balai nikah sebanyak 256 Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, 32 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) juga didanai melalui Sukuk. Adapun pagu yang diberikan untuk Kementerian Agama sebesar Rp1,9 triliun.

Kementerian Perhubungan juga telah memanfaatkan pembiayaan Sukuk untuk membangun 15 proyek jalur kereta api double-double track serta jalur elevated di pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dengan jalur ganda ini, maka produktivitas KRL Jabodetabek akan meningkat dan jumlah penumpang yang terangkut

lebih banyak lagi. Kementerian Perhubungan memperoleh pagu melalui pembiayaan Sukuk sebesar Rp8,6 triliun.

Di sisi pinjaman luar negeri, hampir 60 persen dari pinjaman luar negeri digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga. Selama tahun 2017 Kementerian PUPR mendapat alokasi Rp6,2 triliun dan Kementerian Riset dan Teknologi mendapatkan Rp1,3 triliun. Sementara itu, Kementerian Perhubungan mendapat alokasi sebesar Rp1,0 triliun untuk pembiayaan infrastrukturnya.

Pembangunan rel kereta *double-double track* Bekasi-Manggarai merupakan salah satu contoh pemanfaatan pinjaman luar negeri untuk pembangunan infrastruktur. Diharapkan pembangunan double-double track tersebut akan menambah jadwal kereta Bekasi ke Jakarta sehingga dapat mengangkut penumpang dari luar Jakarta lebih banyak. Dengan demikian, hal ini akan mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta.

*Mass Rapid Transport (MRT)* merupakan contoh lain pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Pembangunan MRT ini terdiri atas 2 fase. Fase I akan melayani Lebak Bulus sampai Bundaran HI dan rencananya akan mulai beroperasi tahun 2019. Sedangkan Fase 2

akan menghubungkan Bundaran HI dengan Kampung Bandan. Pembangunan MRT ini akan membantu para penduduk yang bekerja di Jakarta namun bertempat tinggal di kota penyangga Jakarta untuk lebih efisien dalam pengaturan waktu serta mengurangi kepadatan lalu lintas.

Untuk pinjaman dalam negeri sampai saat ini baru dimanfaatkan untuk membiayai hal-hal tertentu seperti penguatan sistem persenjataan dan peralatan TNI maupun Polri. Adapun realisasi pinjaman dalam negeri selama tahun 2017 mencapai 22,7 persen dari target.

**Posisi Utang hingga akhir Desember 2017**  
(dalam triliun rupiah)

	Nominal	%
Total Utang Pemerintah Pusat	3.938,7	100%
a. Pinjaman	744,0	18,9%
1). Pinjaman Luar Negeri	738,4	18,7%
Bilateral	313,7	8,0%
Multilateral	381,2	9,7%
Komersial	42,6	1,1%
Suppliers (Pinjaman Kredit Ekspor)	1,0	0,0%
2). Pinjaman Dalam Negeri	5,5	0,1%
b. Surat Berharga Negara	3.194,7	81,1%
Denominasi Valas	853,6	21,7%
Denominasi Rupiah	2.341,1	59,4%
Pendapatan Domestik Bruto	13.476,0	
Rasio Total Utang thd PDB	29,2%	

Hingga akhir Desember 2017 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih sanggup menutup hampir 4 kali dari jumlah *outstanding* utang Pemerintah sejumlah Rp3.938,7 triliun atau sekitar 29,2 persen dari PDB. Jumlah tersebut terdiri atas instrumen pinjaman sebesar Rp744,0 triliun atau 189 persen dari total *outstanding*, dan SBN sebesar Rp3.194,7 triliun atau 81,1 persen dari total *outstanding*.

Adapun jumlah *outstanding* SBN tersebut belum termasuk prefunding yang dilakukan di akhir 2017 sebesar USD 4 miliar yang akan dicatatkan di tahun 2018.

Dalam portofolio SBN, porsi SBN berdenominasi valas lebih kecil dibandingkan SBN Rupiah, masing-masing 21,7 persen dan 59,4 persen. Di sisi lain dalam portofolio pinjaman, porsi pinjaman luar negeri juga relatif rendah sekitar 18,9 persen terhadap total *outstanding*. Hal ini menunjukkan cukup rendah dan masih terjaganya risiko nilai tukar dari portofolio utang Pemerintah.

Untuk komposisi pinjaman luar negeri, berdasarkan pemberi pinjaman terbagi dalam bilateral, multilateral, komersial, dan *supplier* (pinjaman kredit ekspor). Dalam komposisi itu, porsi terbesar merupakan pinjaman dari lembaga multilateral. Porsi yang besar pada lembaga multilateral menunjukkan masih diperlukannya program-program pembangunan global seperti Sustainable Development Goals (SDG) yang ditransmisikan ke dalam program-program pembangunan nasional. Keahlian dan dukungan teknis dari lembaga-lembaga multilateral tersebut masih dibutuhkan untuk menangani isu-isu pembangunan serta isu-isu struktural dan sektoral. Selain itu, biaya pinjaman luar negeri dari lembaga

multilateral yang relatif rendah dibandingkan pemberi pinjaman lainnya, menunjukkan bahwa biaya pembiayaan yang cukup efisien.

Efisiensi biaya utang juga didukung oleh semakin membaiknya peringkat kredit Indonesia. Pada tahun 2017, semua lembaga pemeringkat kredit memberikan peringkat investment grade. Yang terakhir adalah penilaian dari Fitch pada tanggal 21 Desember 2017 dengan menaikkan peringkat kredit Indonesia dari BBB- menjadi BBB dengan prospek stabil. Salah satu variabel penilaian dari lembaga pemeringkat kredit dengan meletakkan Indonesia pada posisi *investment grade* adalah utang terhadap PDB yang tidak melebihi 60 persen. Berdasarkan perhitungan, utang Indonesia terhadap PDB per akhir tahun 2017 masih masuk dalam kategori aman.

Dari segi pemanfaatan pembiayaan, selama tahun 2017 peran pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya semakin besar. Selain menutupi defisit peran pembiayaan untuk pendalaman pasar keuangan juga semakin meningkat, terutama melalui instrumen SBN. Tidak kalah pentingnya pula peran pembiayaan dalam mengembangkan perekonomian yang inklusif melalui penjualan SBN ritel ke masyarakat. Sementara itu, peran pembiayaan melalui pinjaman sebagian besar diarahkan pada pembiayaan kegiatan atau proyek pembangunan. Selama 2017 pinjaman luar negeri telah membiayai berbagai kegiatan, terutama infrastruktur. Sedangkan pinjaman dalam negeri baru digunakan untuk membiayai kegiatan pertahanan dan keamanan.

## Penerbitan SUN denominasi USD dengan format SEC-Registration

---

**P**enerbitan dengan format SEC-Registered merupakan kewajiban bagi setiap issuer yang melakukan *public offering* di pasar modal Amerika Serikat (AS). Issuer diwajibkan menyiapkan *registration statement*, dan khusus bagi issuer dari Pemerintah harus mendaftarkan surat berharga sesuai regulasi yang ditetapkan.

Sebagai negara yang secara reguler melakukan penerbitan dalam pasar obligasi G3 Asia, SEC-Registered memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk dapat mengembangkan dan memperluas basis investor serta meningkatkan kepercayaan investor. Potensi tambahan investor diperoleh antara lain dari investor yang khusus menerapkan restriksi atau pembatasan terhadap portofolio investasinya untuk global bonds dengan format SEC-Registered serta dari investor pasif yang mendasarkan portofolio investasinya pada komposisi yang membangun indeks tertentu seperti Barclays Capital US Aggregate Index. Dengan SEC-Registered memungkinkan Indonesia untuk dapat masuk ke dalam indeks global tersebut. Selain itu, potensi tambahan investor

juga diperoleh dari investor ritel di AS. Pada format penerbitan yang dilakukan selama ini yang dapat berpartisipasi untuk investor di AS terbatas pada *Qualified Institutional Buyers* (QIBs).

Transaksi dengan format SEC-Registered Standalone ini juga membuka kesempatan bagi Pemerintah untuk menyiapkan SEC-Registered Shelf agar memperoleh akses pasar yang lebih efisien di masa yang akan datang. Secara portofolio pembiayaan Pemerintah, penerbitan kali ini membuat kurva imbal hasil (*yield*) Pemerintah Indonesia semakin baik dan mencatat rekor *yield curve* paling rata di antara tenor 5, 10, dan 30 tahun (*the flattest curve ever*), dengan *yield* terendah yang pernah diperoleh untuk tenor 5 dan 10 tahun masing-masing sebesar 3,00% dan 4,40%. Pencapaian *yield* yang rendah tersebut tidak terlepas dari keberhasilan menekan *new issue concession* hingga di posisi negatif. Adapun dalam *public offering* kali ini terdapat kelebihan jumlah pemesanan (*oversubscribed*) dengan *oversubscription* mencapai 2,48 kali.

## Komitmen Tinggi Pemerintah untuk Infrastruktur dengan Alokasi APBN-P 2017 Sebesar Hampir 70%

Pemerintah mengalokasikan sebesar total Rp60,7 triliun pada APBNP TA 2017 untuk pembiayaan investasi. Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) memperoleh alokasi pembiayaan investasi terbesar dari jumlah total tersebut yakni sebesar Rp32,1 triliun atau sekitar 52,8 persen. Alokasi pembiayaan investasi BLU LMAN ditujukan untuk uang ganti kerugian pengadaan tanah proyek infrastruktur jalan tol, perkeretaapian, pelabuhan, dan bendungan. BLU LMAN merupakan operator dari pengelola barang dalam rangka optimalisasi aset negara dan pelaksanaan fungsi *land bank* yang akan mendukung pendanaan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur. Pengadaan lahan tersebut khususnya diperuntukkan bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan proyek infrastruktur sebagai upaya mewujudkan Nawacita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Alokasi pembiayaan investasi terkait infrastruktur lainnya adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun guna mendukung PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rangka penugasan penyelenggaraan

operasional prasarana dan sarana Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek). Selain itu, Pemerintah RI mengalokasikan anggaran kewajiban penjaminan Rp1 triliun dengan rincian sebesar Rp802,4 miliar untuk mendukung penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional dan penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN sebesar Rp203 miliar.

Selanjutnya, terdapat alokasi Penyertaan Modal Negara sebesar Rp2 triliun pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI dan Rp1 triliun pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PT PII. Sasaran *output* atas PMN kepada PT SMI (Persero) yaitu mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis nasional, proyek prioritas, atau KPBU melalui pembiayaan, jasa konsultasi, maupun penyiapan proyek, antara lain pembiayaan proyek jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar. Tak kalah penting adalah PMN untuk PT PII yang meningkatkan kapasitas PT PII (Persero) dalam melakukan penjaminan proyek, antara lain : 1) beberapa proyek yang sedang dalam proses penjaminan seperti proyek pembangunan PLTU dan proyek air minum; 2) beberapa proyek baru

yang diusulkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk mendapatkan penjaminan seperti proyek Jalan Tol dan rumah sakit; dan 3) mendukung penugasan dalam rangka pemberian jaminan Pemerintah Pusat untuk pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN.

Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasi investasi bagi infrastruktur perumahan. Hal tersebut ditunjukkan dengan alokasi dana bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sebesar Rp3,1 triliun dan alokasi PMN sebesar Rp1 triliun pada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF. PMN kepada PT SMF (Persero) dalam APBN tahun 2017 akan digunakan untuk : 1) memperkuat struktur permodalan sehingga meningkatkan kemampuan PT SMF dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitas likuiditas (*liquidity facility*); dan (2) memberikan daya ungkit (*leverage*) sumber dana bagi pasar primer pembiayaan perumahan sehingga dapat mendukung pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan untuk mendukung program Pemerintah di bidang perumahan rakyat. Adapun alokasi dana bergulir pada BLU PPDPP digunakan untuk mendanai program FLPP dengan target kredit pemilikan rumah (KPR) masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hingga Triwulan IV tahun 2017, BLU PPDPP telah merealisasikan seluruh alokasi dana sebesar Rp3,1 triliun dengan target pembiayaan KPR MBR sebanyak 40.000 unit pada tahun 2017. Alokasi pembiayaan investasi kepada BLU LMAN untuk pengadaan tanah jalan tol sebesar Rp32,1 triliun telah direalisasikan pada akhir tahun 2017 untuk menyelesaikan pembayaran ruas-ruas tol Trans Jawa, tol Jabodetabek, non Trans Jawa dan ruas-ruas tol baru yang dapat mempercepat konektivitas sehingga menumbuhkan pusat perekonomian baru dan mengurangi logistic cost seperti ruas tol Bakaheuni-Terbanggi Besar dan ruas tol trans Sumatra lainnya, serta proyek-proyek pelabuhan, bendungan dan LRT Jabodebek. Adapun PMN pada PT KAI, PT SMI, PT SMF, dan PT PII telah terealisasi pada akhir Desember 2017. Hingga 31 Desember 2017, Pemerintah telah merealisasikan hampir 100 persen dari alokasi anggaran pembiayaan investasi sebesar Rp60,7 triliun.

Jumlah total alokasi pembiayaan infrastruktur yang mencapai Rp42,2 triliun dari total alokasi pembiayaan investasi sebesar Rp60,7 triliun atau sebesar 69,4 persen tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Republik Indonesia dalam mendorong percepatan infrastruktur nasional.

## Revaluasi BMN tahun 2017 Naik 271,3 Persen (Rp1.821 triliun) dari Nilai Buku

---

**K**ementerian Keuangan melakukan Revaluasi atau penilaian kembali aset Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2017 dan 2018 untuk menyesuaikan dengan nilai wajar yang layak saat ini. Pasalnya saat ini nilai aset akan terus berkembang seiring tumbuhnya ekonomi, apalagi penghitungan aset BMN terakhir kali dilakukan pada 10 tahun yang lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan nilai tanah dan properti pasti mengalami eskalasi dalam 10 tahun terakhir, sehingga ada kemungkinan nilai BMN yang tercatat saat ini bersifat di bawah nilai wajar (*undervalued*). Tak hanya eskalasi nilai, beberapa BMN juga tentu mengalami depresiasi. Dalam konteks inilah dari sisi akurasi, BMN Indonesia perlu dilakukan revaluasi lagi. Dengan penilaian kembali BMN diharapkan dapat menghasilkan nilai BMN yang update, database BMN yang lebih baik guna kepentingan pengelolaan BMN mendatang. Selain itu, revaluasi juga diharapkan mampu mengidentifikasi aset *idle* guna dioptimalkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mampu mendorong penggunaan BMN sebagai underlying asset penerbitan SBSN atau sukuk secara lebih efisien.

Selain penyesuaian dari BMN yang sudah ada (*existing*), nilai BMN juga bisa meningkat karena akumulasi belanja modal yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data belanja, rata-rata pengeluaran untuk belanja modal dari APBN per tahun mencapai Rp115 triliun sejak 2011. Belanja APBN dari pemerintah tentu menciptakan akumulasi barang modal, sehingga (nilai BMN) bisa naik. Semenjak 2011, belanja modal di atas Rp115 triliun per tahun.

Revaluasi BMN juga diperlukan untuk menjadi aset dasar (*underlying aset*) dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dana dari penerbitan SBSN sangat penting untuk membiayai belanja negara yang tahun depan diperkirakan sebesar Rp2.220,7

triliun sesuai APBN 2018. Tahun lalu, nilai BMN yang tercatat adalah Rp2.188 triliun. Angka ini tercatat 40,1 persen dari total aset negara yang mencapai Rp5.456 triliun di periode yang sama. Sampai dengan 31 Desember 2017, capaian Nasional revaluasi BMN untuk target 2017 adalah sebesar 102,34 persen, dimana BMN yang ditargetkan untuk direvaluasi pada tahun 2017 adalah sebanyak 356.888 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN, dengan realisasi sebanyak 365.242 NUP atau terdapat kelebihan 8.354 NUP dari target. Dari sisi kenaikan nilai, terdapat kenaikan nilai sebesar 271,3 persen dengan rincian Nilai Buku sebelum revaluasi sebesar Rp678 triliun, dimana nilai setelah revaluasi 2017 sebesar Rp2.499 triliun atau terdapat kenaikan sebesar Rp1.821 triliun.



## Realisasi APBN 2016 - 2017

(dalam miliar rupiah)

---

### URAIAN

---

#### A. PENDAPATAN NEGARA

- I. PENDAPATAN DALAM NEGERI
  - 1. PENERIMAAN PERPAJAKAN
    - a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri
    - b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
  - 2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
- II. PENERIMAAN HIBAH

---

#### B. BELANJA NEGARA

- I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
  - 1. Belanja K/L
  - 2. Belanja Non K/L
- II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
  - 1. Transfer ke Daerah
  - 2. Dana Desa

---

#### C. KESEIMBANGAN PRIMER

---

#### D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)

% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB

---

#### E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)

- I. PEMBIAYAAN UTANG
  - II. PEMBIAYAAN INVESTASI
  - III. PEMBERIAN PINJAMAN
  - IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN
  - V. PEMBIAYAAN LAINNYA
- KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN
- 

\* Sampai dengan publikasi ini dirilis, angka realisasi sampai dengan 31 Desember 2017 mengalami update dengan tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp4 triliun.

2016				2017			
APBNP	Realisasi	% thd APBNP	growth (%)	APBNP	Realisasi	% thd APBNP	growth (%)
<b>1,786,225.0</b>	<b>1,555,934.2</b>	<b>87.1</b>	<b>3.2</b>	<b>1,736,060.1</b>	<b>1,655,754.7</b>	<b>95.4</b>	<b>6.4</b>
1,784,249.9	1,546,946.5	86.7	3.4	1,732,952.0	1,648,142.7	95.1	6.5
1,539,166.2	1,284,970.1	83.5	3.6	1,472,709.9	1,339,780.7 *	91.0	4.3
1,503,294.7	1,249,499.5	83.1	3.7	1,436,730.9	1,300,774.3	90.5	4.1
35,871.5	35,470.7	98.9	1.5	35,979.0	39,006.4	108.4	10.0
245,083.6	261,976.3	106.9	2.5	260,242.1	308,362.0	118.5	17.7
1,975.2	8,987.7	455.0	(24.9)	3,108.1	7,612.0	244.9	(15.3)
<b>2,082,948.9</b>	<b>1,864,275.1</b>	<b>89.5</b>	<b>3.2</b>	<b>2,133,295.9</b>	<b>2,001,597.8</b>	<b>93.8</b>	<b>7.4</b>
1,306,696.0	1,154,018.2	88.3	(2.5)	1,366,956.6	1,259,605.4	92.1	9.1
767,809.9	684,204.4	89.1	(6.5)	798,585.3	759,581.9	95.1	11.0
538,886.1	469,813.8	87.2	4.1	568,371.3	500,023.5	88.0	6.4
776,252.9	710,256.9	91.5	14.0	766,339.3	741,992.4	96.8	4.5
729,270.8	663,577.5	91.0	10.2	706,339.3	682,225.8	96.6	2.8
46,982.1	46,679.3	99.4	124.8	60,000.0	59,766.6	99.6	28.0
<b>(105,505.6)</b>	<b>(125,579.7)</b>	<b>119.0</b>	<b>(11.9)</b>	<b>(178,039.4)</b>	<b>(129,274.1)</b>	<b>72.6</b>	<b>2.9</b>
<b>(296,723.9)</b>	<b>(308,340.9)</b>	<b>103.9</b>	<b>3.3</b>	<b>(397,235.8)</b>	<b>(345,843.1)</b>	<b>87.1</b>	<b>12.2</b>
(2.35)	(2.49)			(2.92)	(2.57)		
<b>296,723.9</b>	<b>334,503.3</b>	<b>112.7</b>	<b>3.5</b>	<b>397,235.8</b>	<b>364,544.0</b>	<b>91.8</b>	<b>9.0</b>
371,562.6	403,009.3	108.5	5.8	461,343.6	426,115.3	92.4	5.7
(93,984.8)	(89,079.8)	94.8	49.3	(59,733.8)	(59,754.0)	100.0	(32.9)
461.7	1,662.8	360.2	10.5	(3,668.7)	(1,173.6)	32.0	(170.6)
(651.7)	(651.7)	100.0	n.a.	(1,005.4)	(1,005.4)	100.0	54.3
19,336.1	19,562.8	101.2	5,624.6	300.0	361.8	120.6	(98.2)
0.0	26,162.4			0.0	18,700.9		

---

Kementerian Keuangan  
Republik Indonesia  
2018